

	News Title : Bappebti Targetkan Bursa Crypto Berdiri pada 2023	
	Media Name : techinasia.com	Journalist : Shanies Tri Pinasthi
	Publish Date : 24 January 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Teknologi	Topic : Bursa Aset Kripto

TECH UPDATE / TEKNOLOGI

Ditulis oleh Shanies Tri Pinasthi · 1h ago

Bappebti Targetkan Bursa *Crypto* Berdiri pada 2023



Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menargetkan bursa *crypto* bisa dibentuk pada 2023, usai batal terealisasi pada 2022.

“Sesuai arahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, agar Bappebti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset *crypto* di Indonesia. Dengan kata lain, kami siap menghadirkan bursa *crypto* pada tahun 2023 ini,” kata Didid dalam siaran persnya.

Bappebti akhir tahun lalu mengaku kesulitan mencari tolok ukur (*benchmarking*) bursa *crypto* yang sesuai kondisi Indonesia. Badan ini masih berupaya memastikan agar bursa *crypto*—termasuk sistem kliring dan kustodian di dalamnya—nantinya bisa berjalan dengan baik.

Baca juga: Rencana Bappebti dan masa depan perdagangan *crypto* di Indonesia

Pembentukan bursa *crypto* dinilai Bappebti kian mendesak karena pelanggan terdaftar aset *crypto* di Indonesia per November 2022 mencapai 16,55 juta orang, naik 5 juta dibandingkan akhir 2021.

Ikuti, hapus iklan dengan bertanggung jawab. Dukung jurnalisme independen & berkualitas.

Wacana pembentukan bursa *crypto* muncul sejak 2020. Semula bursa ini ditargetkan terwujud pada akhir 2021. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada Juli 2022 menyebut pembentukan bursa *crypto* bertujuan membuat perdagangan aset tersebut jadi lebih akuntabel dan melindungi konsumen.

Selain bursa *crypto*, Bappebti bersama Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset *crypto* dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RPP ini akan disusun paling lambat 6 bulan dan masa transisi dilakukan selama 2 tahun atau 24 bulan.

(Diedit oleh Lahu Rahadian)